



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7. Standar Harga Satuan adalah standar nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Standar Satuan Biaya Honorarium adalah biaya setinggi-tingginya dari honor yang diberikan kepada tim dan perorangan dalam suatu kegiatan.
9. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi.
10. Standar Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan adalah biaya setinggi-tingginya dari penyelenggaraan rapat atau pertemuan lingkup Pemerintah Daerah.
11. Standar Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari pengadaan kendaraan dinas lingkup Pemerintah Daerah.
12. Standar Satuan Biaya Pemeliharaan adalah biaya setinggi -tingginya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin guna mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tentang Standar Harga Satuan adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan Standar Harga Satuan adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja.
- (3) Standar Harga Satuan untuk:
 - a. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - b. biaya perjalanan dinas dalam negeri (akomodasi dan transportasi); dan
 - c. biaya pemeliharaan.dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dalam hal memiliki dasar yang sah dan/atau dapat dipertanggungjawabkan bukti pembayarannya (*riil cost*).
- (4) Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
 1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 3. satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor;
 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 5. satuan biaya pemeliharaan; dan
 6. satuan biaya upah, sewa, makan dan minum, uang saku/transportasi/ insentif.
- (5) Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 2 menjadi pedoman dalam satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perjalanan dinas.

- (6) Rincian dan uraian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada Tanggal 1 Januari 2023, maka:

Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 63); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 58

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA sebagai Kuasa BUD);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
- 1.1.4. Bendahara; dan
- 1.1.5. Pengguna Barang.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing- masing DPA.
- b. Untuk membantu PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan, PA/KPA dapat menetapkan PPTK.
- c. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atas usul PPKD, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- d. Besaran honorarium sesuai dengan pagu dana sebagai berikut :
 1. Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran didasarkan total pagu yang dikelola SKPD.
 2. Bendahara Penerimaan /Pembantu Bendahara Penerimaan didasarkan target Penerimaan.
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan total pagu yang dilimpahkan oleh PA ke KPA.
- e. Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Perhitungan besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan setiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).

- f. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) PA yang dapat dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 5 (lima) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - 5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan setiap bulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

1.2.3. Honorarium Pengelola Teknis/Pengawas Lapangan

Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang undangan.

Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

1.2.4. Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung.

Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung diberikan kepada personil yang diangkat atau ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas membantu Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai bidang keahlian dan teknis pekerjaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.6. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.7. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa, Pengawas Lapangan, Tim Teknis/Tim Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

- 2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
 - c. Dalam hal moderator berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator
- 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara) , pelaksana, pejabat fungsional, Tenaga kontrak dan Non PNS yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
 2. Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 3. Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 4. Pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 5. Tenaga kontrak dan Non PNS dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam penyelesaian output kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah paling banyak 2 buah Tim. Dengan ketentuan satuan honorarium paling banyak 3 (tiga) OB atau 3 (tiga) OK dalam 1 (satu) Tim pada 1 (satu) tahun anggaran.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dibentuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; dan/atau
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- c. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
- e. Tim termasuk dalam Keputusan Bupati mengenai daftar honorarium yang dikecualikan.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Jumlah keanggotaan dalam sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum.

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik).

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi/ kabupaten sesuai dengan tabel lampiran;
- b. Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran;
- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran.

1.8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.9. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing *experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1.11.1 Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sebagai bagian dari TAPD.

Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati dalam rangka membantu tugas-tugas dari TAPD.

Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.12. Honorarium Tim Swakelola (Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas) dapat diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati dalam rangka tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas pekerjaan swakelola.

1.13. Honorarium Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dapat diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati dalam rangka koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.14. Honorarium Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) dapat diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah dalam rangka koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Satuan Biaya Honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|------|---|--------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | |
| | 1.1.1. Pejabat Pengelola keuangan (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA sebagai Kuasa BUD) | | |
| | a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp543.250,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | Rp750.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OB | Rp950.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OB | Rp1.160.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OB | Rp1.470.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OB | Rp1.780.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp2.090.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas RP 10 M s.d. Rp 25 M | OB | Rp2.510.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M | OB | Rp2.920.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M | OB | Rp3.340.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M | OB | Rp3.750.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas RP 100 M s.d. Rp 250 M | OB | Rp4.270.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M | OB | Rp4.790.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M | OB | Rp5.310.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun | OB | Rp5.830.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp6.870.000,00 |

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| | 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp350.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | Rp375.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp400.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M | OB | Rp430.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M | OB | Rp700.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M | OB | Rp750.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M | OB | Rp875.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 M s.d. Rp 25 M | OB | Rp900.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M | OB | Rp1.310.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M | OB | Rp1.500.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M | OB | Rp1.750.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 M s.d. Rp 250 M | OB | Rp2.000.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M | OB | Rp2.250.000,00 |
| | n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M | OB | Rp2.500.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun | OB | Rp2.750.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp3.000.000,00 |
| | 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan | | |
| | 1.1.3.1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD | | |
| | a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | Rp250.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | Rp260.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp280.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M | OB | Rp525.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M | OB | Rp650.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M | OB | Rp700.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M | OB | Rp750.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 M s.d. Rp 25 M | OB | Rp800.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M | OB | Rp900.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M | OB | Rp1.050.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M | OB | Rp1.150.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 M s.d. Rp 250 M | OB | Rp1.250.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M | OB | Rp1.450.000,00 |
| | n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M | OB | Rp1.650.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun | OB | Rp1.850.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp2.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| | 1.1.3.2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD) | | |
| | a. Nilai pagu dana Rp100 s.d. Rp500 juta | OB | Rp125.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d. Rp 1 M | OB | Rp150.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana Rp1M s.d. Rp 5 M | OB | Rp225.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana Rp5 M s.d. Rp 20 M | OB | Rp300.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana Rp 20 M s.d. 50 M | OB | Rp400.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana Rp50 M s.d. Rp100 M | OB | Rp500.000,00 |
| | g. Nilai Pagu diatas Rp100 M | OB | Rp600.000,00 |
| | 1.1.4. BENDAHARA | | |
| | 1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran | | |
| | a. Nilai pagu dana sd Rp1 M | OB | Rp570.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OB | Rp670.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OB | Rp770.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp860.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana Rp10 M s.d. Rp25 M | OB | Rp1.090.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M | OB | Rp1.320.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp100 M | OB | Rp2.320.000,00 |
| | 1.1.4.2. Bendahara Pengeluaran Pembantu: | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 M | OB | Rp430.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OB | Rp500.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OB | Rp570.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp640.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M | OB | Rp810.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M | OB | Rp980.000,00 |
| | 1.1.4.3. Pembantu Bendahara Pengeluaran: | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 M | OB | Rp300.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. 5 M | OB | Rp500.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp20 M | OB | Rp750.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp20 M | OB | Rp800.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp100 M | OB | Rp1.100.000,00 |
| | 1.1.4.4. Bendahara Penerimaan | | |
| | a. Target s.d. Rp100 Juta | OB | Rp340.000,00 |
| | b. Target sampai dengan Rp1 M | OB | Rp570.000,00 |
| | c. Target Rp1 M s.d. Rp10 M | OB | Rp860.000,00 |
| | d. Target Rp10 M s.d. 25 M | OB | Rp1.090.000,00 |
| | e. Target diatas Rp25 M s.d. Rp50 M | OB | Rp1.320.000,00 |
| | f. Target diatas Rp50 M s.d. Rp75 M | OB | Rp1.550.000,00 |

| | | | |
|------|---|----|----------------|
| | 1.1.4.5.Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| | a. Target s.d. Rp100 Juta | OB | Rp260.000,00 |
| | b. Target Rp100 Juta s.d. Rp1 M | OB | Rp430.000,00 |
| | c. Target Rp1 M s.d. Rp5 M | OB | Rp570.000,00 |
| | d. Target Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp640.000,00 |
| | e. Target Rp10 M s.d. 25 M | OB | Rp810.000,00 |
| | 1.1.4.6.Pembantu Bendahara Penerimaan: | | |
| | a. Nilai target dana s.d. Rp100 Juta | OB | Rp200.000,00 |
| | b. Nilai target dana diatas Rp100 Juta s.d. Rp1 M | OB | Rp300.000,00 |
| | c. Nilai target dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp400.000,00 |
| | d. Nilai target dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M | OB | Rp500.000,00 |
| | e. Nilai target dana diatas Rp25 M s.d. Rp50 M | OB | Rp900.000,00 |
| | f. Nilai target dana diatas Rp50 M | OB | Rp1.150.000,00 |
| | 1.1.5 PENGGUNA BARANG/PERANGKAT DAERAH | | |
| | 1.1.5.1.PENGURUS BARANG PENGGUNA | | |
| | a. Jumlah nilai aset dibawah Rp1 M | OB | Rp500.000,00 |
| | b. Jumlah nilai aset diatas Rp1 M s.d. Rp5 M | OB | Rp750.000,00 |
| | c. Jumlah nilai aset diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp1.000.000,00 |
| | d. Jumlah nilai aset diatas Rp10 M s.d. Rp100 M | OB | Rp1.250.000,00 |
| | e. Jumlah nilai aset diatas Rp100 M | OB | Rp1.500.000,00 |
| | 1.1.5.2.PENGURUS BARANG PEMBANTU | | |
| | a. Jumlah nilai aset dibawah Rp1 M | OB | Rp250.000,00 |
| | b. Jumlah nilai aset diatas Rp1 M s.d. Rp5 M | OB | Rp500.000,00 |
| | c. Jumlah nilai aset diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp750.000,00 |
| | d. Jumlah nilai aset diatas Rp10 M s.d. Rp100 M | OB | Rp1.000.000,00 |
| | e. Jumlah nilai aset diatas Rp100 M | OB | Rp1.250.000,00 |
| | 1.1.5.3.PEMBANTU PENGURUS BARANG | | |
| | a. Jumlah nilai aset dibawah Rp1 M | OB | Rp150.000,00 |
| | b. Jumlah nilai aset diatas Rp1 M s.d. Rp5 M | OB | Rp250.000,00 |
| | c. Jumlah nilai aset diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp375.000,00 |
| | d. Jumlah nilai aset diatas Rp10 M s.d. Rp100 M | OB | Rp500.000,00 |
| | e. Jumlah nilai aset diatas Rp100 M | OB | Rp625.000,00 |
| 1.2. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | 1.2.1.Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa | OB | Rp680.000,00 |
| | 1.2.2.Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta | OB | Rp300.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | OB | Rp400.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OB | Rp550.000,00 |

| | | | |
|--|---|----|----------------|
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OB | Rp700.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OB | Rp900.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M | OB | Rp1.000.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp1.200.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp15 M | OB | Rp1.500.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 M s.d. Rp25 M | OB | Rp1.700.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M | OB | Rp2.000.000,00 |
| | 1.2.3.Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta | OB | Rp150.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | OB | Rp200.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OB | Rp250.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OB | Rp300.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OB | Rp350.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M | OB | Rp400.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10 M | OB | Rp450.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp25 M | OB | Rp500.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M | OB | Rp600.000,00 |
| | 1.2.4.Tim Teknis/ Tim Pendukung | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta | OP | Rp225.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp300.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OP | Rp450.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OP | Rp600.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OP | Rp750.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M | OP | Rp900.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10 M | OP | Rp1.000.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp15 M | OP | Rp1.200.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 M s.d. Rp25 M | OP | Rp1.500.000,00 |
| | 1.2.5.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa | | |
| | 1.2.5.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp200 juta | OP | Rp 680.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta | OP | Rp 850.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OP | Rp1.020.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OP | Rp1.270.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 M s.d. Rp5 M | OP | Rp1.520.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OP | Rp1.780.000,00 |

| | | | |
|--|---|----|-----------------|
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10M s.d Rp25M keatas | OP | Rp2.120.0000,00 |
| | 1.2.5.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp 200 Juta | OP | Rp760.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp760.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OP | Rp920.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OP | Rp1.140.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OP | Rp1.370.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp10 M | OP | Rp1.600.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp25 M | OP | Rp1.910.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M | OP | Rp2.210.000,00 |
| | 1.2.5.3.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 Juta | OP | Rp450.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp50 juta s.d. Rp100 juta | OP | Rp450.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta | OP | Rp450.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OP | Rp480.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OP | Rp600.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1M | OP | Rp720.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp1 M s.d. Rp2,5M | OP | Rp910.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M | OP | Rp1.090.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp5 M | OP | Rp1.270.000,00 |
| | 1.2.6.Honorarium Pengguna Anggaran | | |
| | 1.2.6.1.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M | OP | Rp3.580.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M | OP | Rp4.030.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M | OP | Rp4.490.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun | OP | Rp4.940.000,00 |

| | | | |
|------|---|----|----------------|
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun | OP | Rp5.560.000,00 |
| | 1.2.6.2.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M | OP | Rp3.230.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M | OP | Rp3.640.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M | OP | Rp4.040.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun | OP | Rp4.450.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun | OP | Rp5.010.000,00 |
| | 1.2.6.3.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 M s.d. Rp25 M | OP | Rp1.510.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 M s.d. Rp50 M | OP | Rp1.750.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 M s.d. Rp75 M | OP | Rp1.990.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 M s.d. Rp100 M | OP | Rp2.230.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 M s.d. Rp250 M | OP | Rp2.560.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 M s.d. Rp500 M | OP | Rp2.880.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 M s.d. Rp750 M | OP | Rp3.200.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun | OP | Rp3.520.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun | OP | Rp3.960.000,00 |
| 1.3. | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) | | |
| | 1.3.1. Kepala | OB | Rp1.000.000,00 |
| | 1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung | OB | Rp750.000,00 |
| 1.4. | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR | | |
| | 1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator | | |
| | a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya. | OJ | Rp1.700.000,00 |
| | b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan. | OJ | Rp1.400.000,00 |
| | c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan | OJ | Rp1.200.000,00 |
| | d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Pakar/Praktisi | OJ | Rp800.000,00 |
| | e. Pejabat Eselon III | OJ | Rp700.000,00 |
| | f. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan | OJ | Rp600.000,00 |

| | | | |
|------|--|----------------------|----------------|
| | 1.4.2. Moderator. | OK | Rp700.000,00 |
| 1.5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 1.5.1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp1.300.000,00 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp1.100.000,00 |
| | c. Ketua | OB | Rp900.000,00 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp800.000,00 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp700.000,00 |
| | f. Anggota | OB | Rp500.000,00 |
| | 1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp700.000,00 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp650.000,00 |
| | c. Ketua | OB | Rp600.000,00 |
| | d. Wakil ketua | OB | Rp500.000,00 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp400.000,00 |
| | f. Anggota | OB | Rp350.000,00 |
| | 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Bupati | | |
| | a. Ketua/Wakil Ketua | OB | Rp500.000,00 |
| | b. Anggota | OB | Rp350.000,00 |
| | 1.5.2.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| | g. Ketua/Wakil Ketua | OB | Rp250.000,00 |
| | h. Anggota | OB | Rp220.000,00 |
| 1.6. | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA | | |
| | 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli | OK | Rp1.800.000,00 |
| | 1.6.2. Honorarium Beracara (Kuasa Hukum) | OK | Rp1.800.000,00 |
| 1.7. | HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| | 1.7.1 SLTA | OB | Rp1.400.000,00 |
| | 1.7.2. DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan | OB | Rp1.600.000,00 |
| | 1.7.3. Sarjana (S1) | OB | Rp2.000.000,00 |
| | 1.7.4. Master (S2) | OB | Rp2.200.000,00 |
| | 1.7.5. Doktor (S3) | OB | Rp2.500.000,00 |
| 1.8 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | |
| | 1.8.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp150.000,00 |

| | | | |
|------|---|-------------------------|----------------|
| | b. Pengawas Ujian | OH | Rp240.000,00 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp3.000,00 |
| | 1.8.2.Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp150.000,00 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | Rp200.000,00 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp5.000,00 |
| 1.9 | Honorarium Penulisan Butir Soal. | | |
| | 1.9.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal. | Per Butir Soal | Rp80.000,00 |
| | 1.9.2 Honorarium Telaah Butir Soal. | | |
| | a. Telaah Materi Soal | Per Butir Soal | Rp25.000,00 |
| | b. Telaah Bahasa Soal | Per Butir Soal | Rp15.000,00 |
| 1.10 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT | | |
| | 1.10.1. Honorarium Penceramah | OJP | Rp1.000.000,00 |
| | 1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara | OJP | Rp300.000,00 |
| | 1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara | OJP | Rp200.000,00 |
| | 1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat | Per Modul | Rp4.000.000,00 |
| | 1.10.5. .Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| | a. Lama Diklat s.d. 5 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp400.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil ketua | OK | Rp350.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp300.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp250.000,00 |
| | b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp600.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil ketua | OK | Rp550.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp450.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp400.000,00 |
| | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp900.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil ketua | OK | Rp800.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp600.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp600.000,00 |

| | | | |
|------|--|----|-----------------|
| 1.11 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | 1.11.1.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Pembina | OB | Rp3.300.000,00 |
| | b. Pengarah | OB | Rp3.000.000,00 |
| | c. Ketua | OB | Rp2.500.000,00 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp2.000.000,00 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp1.500.000,00 |
| | f. Anggota | OB | Rp1.300.000,00 |
| | 1.11.2.Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Ketua | OB | Rp1.000.000,00 |
| | b. Sekretaris | OB | Rp900.000,00 |
| | c. Anggota | OB | Rp600.000,00 |
| 1.12 | HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA (TIM PERSIAPAN, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp200 juta | OB | Rp250.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta | OB | Rp300.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M | OB | Rp450.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M | OB | Rp600.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 M s.d. Rp5 M | OB | Rp750.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp7,5 M | OB | Rp900.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 M s.d. Rp10M | OB | Rp1.000.0000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp15M | OB | Rp1.200.0000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp150 M s.d. Rp25M | OB | Rp1.500.0000,00 |
| 1.13 | HONORARIUM TIM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOFIMDA) | | |
| | a. Ketua | OB | Rp6.500.0000,00 |
| | b. Anggota | OB | Rp5.000.0000,00 |
| 1.14 | HONORARIUM TIM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCAM) | | |
| | a. Ketua | OB | Rp600.000,00 |
| | b. Anggota | OB | Rp350.000,00 |

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S 1/ S2/ S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- j. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya representasi perjalanan dinas;
- c. biaya penginapan;

- d. uang transport perjalanan dinas; dan
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* (*rapid test, PCR test, Swab test* dan lain-lain) selama masa pandemic *Covid-19*.

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dalam wilayah Kabupaten Banjar, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal apabila perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan Diklat terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR DAERAH | DIKLAT |
|----|------------------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ACEH | OH | Rp360.000,00 | Rp110.000,00 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 3 | RIAU | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 5 | JAMBI | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 8 | LAMPUNG | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 9 | BENGGULU | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 11 | BANTEN | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | OH | Rp530.000,00 | Rp160.000,00 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 15 | DI. YOGYAKARTA | OH | Rp420.000,00 | Rp130.000,00 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |

| | | | | |
|----|---------------------|----|--------------|--------------|
| 17 | BALI | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | Rp440.000,00 | Rp130.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | Rp360.000,00 | Rp110.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 26 | GORONTALO | OH | Rp370.000,00 | Rp110.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | Rp410.000,00 | Rp120.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | Rp370.000,00 | RP110.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 31 | MALUKU | OH | Rp380.000,00 | Rp110.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | Rp430.000,00 | Rp130.000,00 |
| 33 | PAPUA | OH | Rp580.000,00 | Rp170.000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | Rp480.000,00 | Rp140.000,00 |

TABEL 2.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| NO | KAB. BANJAR/ KAB. KOTA, PROV. KALSEL/D.K.I. JAKARTA | SATUAN | DALAM DAERAH |
|----|--|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Banjar | OH | Rp150.000,00 |
| 2 | Banjarmasin | OH | Rp200.000,00 |
| 3 | Banjarbaru | OH | Rp150.000,00 |
| 4 | Tapin | OH | Rp200.000,00 |
| 5 | Hulu Sungai Selatan | OH | Rp200.000,00 |
| 6 | Tanah Laut | OH | Rp200.000,00 |
| 7 | Barito Kuala | OH | Rp225.000,00 |
| 8 | Hulu Sungai Tengah | OH | Rp225.000,00 |
| 9 | Hulu Sungai Utara | OH | Rp250.000,00 |
| 10 | Balangan | OH | Rp250.000,00 |
| 11 | Tabalong | OH | Rp300.000,00 |
| 12 | Tanah Bumbu | OH | Rp300.000,00 |

| | | | |
|----|----------------|----|--------------|
| 13 | Kotabaru | OH | Rp350.000,00 |
| 14 | D.K.I. JAKARTA | OH | Rp210.000,00 |

Catatan : uang harian diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam.

2. Uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ke luar daerah (luar daerah Kabupaten Banjar atau Provinsi Kalimantan Selatan) dan dalam Daerah (dalam daerah Kabupaten Banjar atau Provinsi Kalimantan Selatan).

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR DAERAH | DALAM DAERAH KAB. BANJAR ATAU PROV. KALSEL LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|----|--------------------------------|--------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH | Rp250.000,00 | Rp125.000,00 |
| 2 | PEJABAT ESELON II | OH | Rp150.000,00 | Rp75.000,00 |

4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATU AN | TARIF HOTEL | | | | | GOLONGAN I/II/PTT |
|----|-----------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I | ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ACEH | OH | Rp4.420.000,00 | Rp3.526.000,00 | Rp1.294.000,00 | Rp556.000,00 | Rp556.000,00 | |
| 2 | SUMUT | OH | Rp4.960.000,00 | Rp1.518.000,00 | Rp1.100.000,00 | Rp530.000,00 | Rp530.000,00 | |
| 3 | RIAU | OH | Rp3.820.000,00 | Rp3.119.000,00 | Rp1.650.000,00 | Rp852.000,00 | Rp852.000,00 | |
| 4 | KEP. RIAU | OH | Rp4.275.000,00 | Rp1.854.000,00 | Rp1.037.000,00 | Rp792.000,00 | Rp792.000,00 | |
| 5 | JAMBI | OH | Rp4.000.000,00 | Rp3.337.000,00 | Rp1.212.000,00 | Rp580.000,00 | Rp580.000,00 | |
| 6 | SUMBAR | OH | Rp5.236.000,00 | Rp3.332.000,00 | Rp1.353.000,00 | Rp650.000,00 | Rp650.000,00 | |
| 7 | SUMSEL | OH | Rp5.850.000,00 | Rp3.083.000,00 | Rp1.571.000,00 | Rp861.000,00 | Rp861.000,00 | |
| 8 | LAMPUNG | OH | Rp4.491.000,00 | Rp2.067.000,00 | Rp1.140.000,00 | Rp580.000,00 | Rp580.000,00 | |
| 9 | BENGKULU | OH | Rp2.071.000,00 | Rp1.628.000,00 | Rp1.546.000,00 | Rp630.000,00 | Rp630.000,00 | |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | Rp3.827.000,00 | Rp2.838.000,00 | Rp1.957.000,00 | Rp622.000,00 | Rp622.000,00 | |
| 11 | BANTEN | OH | Rp5.725.000,00 | Rp2.373.000,00 | Rp1.000.000,00 | Rp718.000,00 | Rp718.000,00 | |
| 12 | JAWA BARAT | OH | Rp5.381.000,00 | Rp2.755.000,00 | Rp1.006.000,00 | Rp570.000,00 | Rp570.000,00 | |
| 13 | D.K.I JAKARTA | OH | Rp5.850.000,00 | Rp1.490.000,00 | Rp992.000,00 | Rp730.000,00 | Rp730.000,00 | |
| 14 | JATENG | OH | Rp4.242.000,00 | Rp1.480.000,00 | Rp954.000,00 | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | |
| 15 | D I Y | OH | Rp5.017.000,00 | Rp2.695.000,00 | Rp1.384.000,00 | Rp845.000,00 | Rp845.000,00 | |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | Rp4.400.000,00 | Rp1.605.000,00 | Rp1.076.000,00 | Rp664.000,00 | Rp664.000,00 | |
| 17 | BALI | OH | Rp4.890.000,00 | Rp1.946.000,00 | Rp990.000,00 | Rp910.000,00 | Rp910.000,00 | |
| 18 | NTB | OH | Rp3.500.000,00 | Rp2.648.000,00 | Rp1.418.000,00 | Rp580.000,00 | Rp580.000,00 | |
| 19 | NTT | OH | Rp3.000.000,00 | Rp1.493.000,00 | Rp1.355.000,00 | Rp550.000,00 | Rp550.000,00 | |
| 20 | KALBAR | OH | Rp2.654.000,00 | Rp1.538.000,00 | Rp1.125.000,00 | Rp538.000,00 | Rp538.000,00 | |
| 21 | KALTENG | OH | Rp4.901.000,00 | Rp3.391.000,00 | Rp1.160.000,00 | Rp659.000,00 | Rp659.000,00 | |
| 22 | KALSEL | OH | Rp4.797.000,00 | Rp3.316.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp540.000,00 | Rp540.000,00 | |
| 23 | KALTİM | OH | Rp4.000.000,00 | Rp2.188.000,00 | Rp1.507.000,00 | Rp804.000,00 | Rp804.000,00 | |
| 24 | KALTARA | OH | Rp4.000.000,00 | Rp2.188.000,00 | Rp1.507.000,00 | Rp804.000,00 | Rp804.000,00 | |
| 25 | GORONTALO | OH | Rp4.168.000,00 | Rp2.549.000,00 | Rp1.431.000,00 | Rp764.000,00 | Rp764.000,00 | |
| 26 | SULBAR | OH | Rp4.076.000,00 | Rp2.581.000,00 | Rp1.075.000,00 | Rp704.000,00 | Rp704.000,00 | |
| 27 | SULSEL | OH | Rp4.820.000,00 | Rp1.550.000,00 | Rp1.020.000,00 | Rp732.000,00 | Rp732.000,00 | |
| 28 | SULTENG | OH | Rp2.309.000,00 | Rp2.027.000,00 | Rp1.567.000,00 | Rp951.000,00 | Rp951.000,00 | |
| 29 | SULTRA | OH | Rp2.475.000,00 | Rp2.059.000,00 | Rp1.297.000,00 | Rp786.000,00 | Rp786.000,00 | |
| 30 | MALUKU | OH | Rp3.467.000,00 | Rp3.240.000,00 | Rp1.048.000,00 | Rp667.000,00 | Rp667.000,00 | |
| 31 | MALUKU UTARA | OH | Rp3.440.000,00 | Rp3.175.000,00 | Rp1.073.000,00 | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 32 | PAPUA | OH | Rp3.859.000,00 | Rp3.318.000,00 | Rp2.521.000,00 | Rp829.000,00 | Rp829.000,00 |
| 33 | PAPUA BARAT | OH | Rp3.872.000,00 | Rp3.212.000,00 | Rp2.056.000,00 | Rp718.000,00 | Rp718.000,00 |

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dan Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN BANJAR.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

| NO | KABUPATEN /KOTA TEMPAT TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Banjarmasin | Orang/Kali | Rp100.000,00 |
| 2 | Banjarbaru | Orang/Kali | Rp75.000,00 |
| 3 | Tapin | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 4 | Hulu Sungai Selatan | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 5 | Tanah Laut | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 6 | Barito Kuala | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 7 | Hulu Sungai Tengah | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 8 | Hulu Sungai Utara | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 9 | Balangan | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 10 | Tabalong | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 11 | Tanah Bumbu | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 12 | Kotabaru | Orang/Kali | Rp300.000,00 |

Transportasi diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas apabila tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan/atau bantuan bahan bakar minyak (BBM)

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN BANJAR DARI IBUKOTA KABUPATEN KE TEMPAT TUJUAN DAN SEBALIKNYA

| NO | TEMPAT TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-----------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Martapura | Orang/Kali | Rp50.000,00 |
| 2 | Martapura Timur | Orang/Kali | Rp50.000,00 |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--------------|
| 3 | Martapura Barat | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 4 | Karang Intan | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 5 | Aranio | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 6 | Gambut | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 7 | Kertak Hanyar | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 8 | Beruntung Baru | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 9 | Aluh-Aluh | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 10 | Sungai Tabuk | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 11 | Simpang Empat | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 12 | Tatah Makmur | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 13 | Astambul | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 14 | Mataraman | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 15 | Cintapuri Darussalam | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 16 | Pengaron | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 17 | Sungai Pinang | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 18 | Sambung Makmur | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 19 | Telaga Bauntung | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| 20 | Paramasan | Orang/Kali | Rp300.000,00 |

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN
MELIPUTI DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN

| NO | TEMPAT TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-----------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Martapura | Orang/Kali | Rp50.000,00 |
| 2 | Martapura Timur | Orang/Kali | Rp50.000,00 |
| 3 | Martapura Barat | Orang/Kali | Rp70.000,00 |
| 4 | Karang Intan | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 5 | Aranio | Orang/Kali | Rp100.000,00 |
| 6 | Gambut | Orang/Kali | Rp70.000,00 |
| 7 | Kertak Hanyar | Orang/Kali | Rp70.000,00 |
| 8 | Beruntung Baru | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 9 | Aluh-Aluh | Orang/Kali | Rp100.000,00 |
| 10 | Sungai Tabuk | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 11 | Simpang Empat | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 12 | Tatah Makmur | Orang/Kali | Rp70.000,00 |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--------------|
| 13 | Astambul | Orang/Kali | Rp70.000,00 |
| 14 | Mataraman | Orang/Kali | Rp70.000,00 |
| 15 | Cintapuri Darussalam | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 16 | Pengaron | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 17 | Sungai Pinang | Orang/Kali | Rp100.000,00 |
| 18 | Sambung Makmur | Orang/Kali | Rp80.000,00 |
| 19 | Telaga Bauntung | Orang/Kali | Rp100.000,00 |
| 20 | Paramasan | Orang/Kali | Rp150.000,00 |

TABEL 2.8
BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

| NO | URAIAN | BIAYA PEMETIAN | BIAYA PENGANGKUTAN |
|----|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BUPATI/WABUP | Rp5.100.000,00 | Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan |
| 2 | SEKDA/PIMPINAN DPRD | Rp5.000.000,00 | |
| 3 | ESELON II/ ANGGOTA DPRD | Rp4.000.000,00 | |
| 4 | ESELON III | Rp3.500.000,00 | |
| 5 | ESELON IV/JABATAN YANG DISETARAKAN /Gol IV | Rp3.500.000,00 | |
| 6 | Fungsional Umum | Rp3.500.000,00 | |

Keterangan :
OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|-----------------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | OP | Rp433.000,00 | Rp510.000,00 | Rp1.216.000,00 | Rp943.000,00 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | OP | Rp264.000,00 | Rp360.000,00 | Rp930.000,00 | Rp624.000,00 |

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|-----------------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | OP | Rp354.000,00 | Rp433.000,00 | Rp1.197.000,00 | Rp787.000,00 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | OP | Rp194.000,00 | Rp295.000,00 | Rp734.000,00 | Rp489.000,00 |

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON III KE BAWAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|-----------------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | OP | Rp354.000,00 | Rp433.000,00 | Rp1.197.000,00 | Rp787.000,00 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | OP | Rp175.000,00 | Rp250.000,00 | Rp700.000,00 | Rp450.000,00 |

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.4, dapat digunakan untuk Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.4
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

| NO | PROVINSI | SATUAN | <i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA | <i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA | <i>FULLDAY/ HALFDAY</i> DI DALAM KOTA | <i>RESIDENCE</i> DI DALAM KOTA |
|----|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | OH | Rp180.000,00 | Rp180.000,00 | Rp130.000,00 | Rp180.000,00 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp130.000,00 | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |

Keterangan :

OP : Orang/Paket

OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk pengadaan kendaraan dinas yang bersifat khusus yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|----|--------------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PEJABAT ESELON II | | |
| 1 | KALIMANTAN SELATAN | Unit | Rp486.306.000,00 |

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

| NO | PROVINSI | SATUAN | PICK UP | MINIBUS | DOUBLE GARDAN |
|----|--------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KALIMANTAN SELATAN | Unit | Rp220.020.000,00 | Rp342.000.000,00 | Rp492.610.000,00 |

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|----------------------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roda 4 dan/atau Bus Kecil | Unit | Rp360.942.000,00 |
| 2 | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit | Rp718.252.000,00 |
| 3 | Roda 6 dan/ atau Bus Besar | Unit | Rp1.184.787.000,00 |

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

| NO | PROVINSI | SATUAN | OPERASIONAL | LAPANGAN |
|----|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | Unit | Rp29.788.000,00 | Rp48.875.000,00 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | Unit | Rp31.080.000,00 | Rp38.901.000,00 |

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1

TABEL.5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | GEDUNG BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR |
|----|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | m ² /tahun | Rp206.000,00 | Rp153.000,00 | Rp11.000,00 |
| 2 | DI. YOGYAKARTA | m ² /tahun | Rp168.000,00 | Rp97.000,00 | Rp10.000,00 |
| 3 | KALIMANTAN SELATAN | m ² /tahun | Rp196.000,00 | Rp148.000,00 | Rp11.000,00 |

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *Overhaul*.

TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|----|--|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/KETUA DPRD | Unit/ Tahun | Rp41.900.000,00 |
| 2 | WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD | Unit/Tahun | Rp41.000.000,00 |
| 3 | PEJABAT ESELON II | Unit/Tahun | Rp38.990.000,00 |

TABEL 5.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| NO | PROVINSI | SATUAN | RODA EMPAT | DOUBLE GARDAN | RODA DUA |
|----|--------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D.K.I. JAKARTA | Unit/Tahun | Rp33.650.000,00 | Rp36.450.000,00 | Rp3.640.000,00 |
| 2 | KALIMANTAN SELATAN | Unit/Tahun | Rp34.380.000,00 | Rp36.620.000,00 | Rp3.800.000,00 |

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Operasional dalam Lingkungan Kantor | Unit/ Tahun | Rp9.750.000,00 |
| 2 | Roda 6 | Unit/ Tahun | Rp37.110.000,00 |
| 3 | Speed Boat | Unit/ Tahun | Rp20.240.000,00 |

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *note book*, printer, AC split, CCTV, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 5.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inventaris Kantor | Pegawai/ Tahun | Rp80.000,00 |
| 2 | Personal Computer/ Notebook | Unit/ Tahun | Rp730.000,00 |
| 3 | Printer | Unit/ Tahun | Rp690.000,00 |
| 4 | AC split | Unit/ Tahun | Rp610.000,00 |
| 5 | AC Standing | Unit/ Tahun | Rp1.600.000 |
| 6 | CCTV | Unit/ Tahun | Rp250.000 |
| 7 | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/ Tahun | Rp7.190.000,00 |
| 8 | Genset 75 KVA | Unit/ Tahun | Rp8.640.000,00 |
| 9 | Genset 100 KVA | Unit/ Tahun | Rp10.150.000,00 |
| 10 | Genset 125 KVA | Unit/ Tahun | Rp10.780.000,00 |
| 11 | Genset 150 KVA | Unit/ Tahun | Rp13.260.000,00 |
| 12 | Genset 175 KVA | Unit/ Tahun | Rp14.810.000,00 |
| 13 | Genset 200 KVA | Unit/ Tahun | Rp15.850.000,00 |
| 14 | Genset 250 KVA | Unit/ Tahun | Rp16.790.000,00 |
| 15 | Genset 275 KVA | Unit/ Tahun | Rp17.760.000,00 |
| 16 | Genset 300 KVA | Unit/ Tahun | Rp20.960.000,00 |
| 17 | Genset 350 KVA | Unit/ Tahun | Rp22.960.000,00 |
| 18 | Genset 450 KVA | Unit/ Tahun | Rp25.620.000,00 |
| 19 | Genset 500 KVA | Unit/ Tahun | Rp31.770.000,00 |

Biaya pemeliharaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk standarnya dan memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan batas tertinggi pemeliharaan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, MAKAN MINUM, SEWA DAN UANG SAKU/TRANSPORTASI DAN INSENTIF, TIM KUASA HUKUM, SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM, SATUAN BIAYA PENGAWASAN DAN SATUAN BIAYA FOTOKOPI.

1. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

- 1.1 Honor Petugas Penunjang Kegiatan merupakan honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang keberadaannya atau dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan.
- 1.2. Upah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang termuat dalam kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Honor Tenaga Kontrak berdasarkan jenjang Pendidikan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak berdasarkan jenjang pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 1.4. Honor Petugas Pelaksana merupakan honor yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan atau ASN diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar keberadaannya ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan.
- 1.5. Honor Petugas Paramedis/ Non Medis Honor diberikan kepada Non PNS yang ditugaskan sebagai Tenaga Paramedis/non medis PSC 119 Intan Banjar.
- 1.6. Honor Petugas Kegiatan Yustisi/ Non Yustisi.
 - a. Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan operasi gabungan Yustisi sesuai dengan jadwal dan permintaan anggota untuk kegiatan operasi.
 - b. Honor yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan Penyidikan dan Operasi Tipiring Gabungan.
 - c. Honor yang diberikan kepada Non ASN dalam kegiatan Pengendalian dan Operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1.7. Honor Tenaga Ahli/Pakar

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1.8. Tali Asih

Diberikan kepada Supervisor dan Fasilitator, Pendamping PKH, Lanjut Usia dan Anak Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial.

2. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

2.1 Biaya Makan Minum Rapat

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat.

2.2 Biaya Makan Minum Rumah Tangga

Satuan biaya makan minum untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati, Satuan biaya makan minum dimaksud sudah termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

3. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa peralatan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH

Satuan biaya uang saku/transportasi diberikan kepada Taruna (I) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Peserta yang mengikuti atraksi/ even kesenian dan kebudayaan/even olah raga atau kepemudaaan, pemulangan orang terlantar baik yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Banjar, di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/tingkat Provinsi atau di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pemberian Insentif dilakukan sebagai penghargaan Pemerintah Daerah terhadap Atlet Daerah yang berprestasi, insentif guru paud, ustadz/ustadzah, guru pondok pesantren, tutor paket, pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), guru inklusi, guru honor, tim puskesmas, insentif Ketua RT/RW, insentif kegiatan Posyandu dan insentif Jaga Linmas, serta pemberian upah pendataan warga belajar dan upah pendamping rehabilitasi sosial/pekerja sosial.

5. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/ transportasi peserta diperuntukkan bagi peserta sosialisasi atau kegiatan sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.

6. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan /proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial).

7. HONORARIUM BIAYA PENGAWASAN

Honorarium Biaya Pengawasan diberikan kepada pelaksana pengawasan yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian honorarium diberikan berdasarkan program kerja pengawasan yang disusun dan sudah memperhitungkan seluruh komponen biaya lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

8. HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL)

Honorarium Pengawal Pribadi/Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) diberikan kepada Tenaga Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dari TNI/POLRI, Petugas Patroli dan Pengawalan (Patwal) lalu lintas dalam Kabupaten dan luar Kabupaten.

9. UPAH PETUGAS ENTRY BIODATA ANAK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (BAKAK).

Upah Petugas Entry Biodata Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (Bakak) adalah upah yang diberikan kepada petugas yang mengentry data kelahiran Tahun 2011 kebawah kedalam Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK) yang ada dalam Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIK).

10. UPAH PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)/LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

Upah Pengisian SPOP/LSOP upah yang diberikan kepada petugas Non ASN yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data tentang bumi, bangunan dan subjek pajak bumi dan bangunan baik untuk data baru maupun perubahan data yang terekam dalam basis data PBB P2.

11. UPAH PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG- PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2).

Upah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi Bangunan - Perkotaan dan Perdesaan (SPPT PBB-P2) adalah upah yang diberikan kepada petugas Non ASN yang terlibat dalam kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 yang dimulai dari cetak massal, verifikasi pemilahan jumlah wajib pajak dan objek pajak sampai penyampaian ke pihak Kecamatan , Desa/Kelurahan.

12. SATUAN BIAYA FOTOKOPI

Satuan biaya fotokopi adalah satuan biaya penggandaan.

13. HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Honorarium Mediator Hubungan Industrial diberikan kepada ASN selaku Mediator yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

14. SATUAN BIAYA LAINNYA

- a. Dalam hal sewa yang berhubungan dengan event atau kegiatan ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan atau standar yan berlaku di lokasi kegiatan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- b. Dalam hal tarif sewa yang ditentukan oleh pihak ketiga dan berlaku umum dan dapat dibandingkan dengan penyedia lainnya di lokasi yang sama, maka tarif atau surat keputusan atau dokumen lain yang sejenis dapat dijadikan standar dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- c. Dalam hal standar honorarium yang belum tercantum pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan karena bersifat temporer dan jenis pekerjaan yang banyak ragamnya, sehingga standar upah diluar dari ketentuan Peraturan Bupati ini dapat menggunakan standar upah yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
- d. Dalam hal besaran honorarium pada pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah dapat menggunakan standar tersebut, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- e. Dalam hal Tenaga Honor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan ini, dapat menggunakan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan batas tertinggi pemberian honorarium.

B. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, MAKAN MINUM, SEWA, UANG SAKU/TRANSPORTASI/INSENTIF/UPAH, TIM KUASA HUKUM ,SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM, SATUAN BIAYA PENGAWASAN DAN SATUAN BIAYA FOTOKOPI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|----|--------------------------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM | | |
| | 1.1 HONOR PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN | | |
| | a. Petugas Survey | OR | Rp7.000,00 |
| | b. Petugas Lapangan | OH | Rp80.000,00 |
| | c. Pengambil Sumpah/ Janji | OK | Rp400.000,00 |
| | d. Rohaniawan | OK | Rp400.000,00 |
| | e. Pembawa Acara (MC) | OK | Rp250.000,00 |
| | f. Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan | OK | Rp250.000,00 |
| | g. Juri/wasit/penilai | OK | Rp500.000,00 |
| | h. Juri/wasit/penilai | OH | Rp300.000,00 |
| | i. Juri/wasit/penilai | OJ | Rp150.000,00 |

| | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|
| | j. Juri/penilai Tenaga Kesehatan, Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi | OH | Rp500.000,00 |
| | k. Petugas sensus barang | OH | Rp50.000,00 |
| | l. Dirigen/ pemandu lagu | OK | Rp150.000,00 |
| | m. Konseptor Pidato | Org/Naskah | Rp100.000,00 |
| | n. Petugas Rekonsiliasi Aset /BMD | OK | Rp350.000,00 |
| | o. Petugas Kebersihan kegiatan (event) | OH | Rp100.000,00 |
| | p. Petugas sound system kegiatan (event) | OH | Rp100.000,00 |
| | q. Petugas Keamanan Kegiatan (event) | OH | Rp100.000,00 |
| | r. Petugas Piket /Jaga Kegiatan (event) | OH | Rp100.000,00 |
| | s. Petugas Humas /peliput Acara/ Dokumentasi | OH | Rp100.000,00 |
| | t. Petugas Parkir (event) | OH | Rp100.000,00 |
| | u. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan | OK | Rp250.000,00 |
| | v. Penceramah Apel Gabungan | OK | Rp500.000,00 |
| | w. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/ Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai/Imam Shalat Hajat | OK | Rp1.000.000,00 |
| | x. Qori/ Qoriah (Pembaca Kitab Suci) | OK | Rp550.000,00 |
| | y. Penceramah | OK | Rp1.000.000,00 |
| | z. Penceramah Kegiatan Maulid, Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an khusus kegiatan Pemkab Banjar | OK | Rp5.000.000,00 |
| | aa. Penceramah Luar Daerah Kegiatan Maulid, Isra Miraj dan Nuzulul Qur'an | OK | Rp30.000.000,00 |
| | bb. Honor Petugas Penjaga Syair Maulid/Burdah di Kabupaten | Group/ Kelompok | Rp2.500.000,00 |
| | cc. Imam Musholla Al Adli | OB | Rp1.500.000,00 |
| | dd. Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional | OK | Rp500.000,00 |
| | ee. Upah tenaga angkutan barang Jamaah Haji | OH | Rp200.000,00 |
| | ff. Upah Tenaga Pendamping Haji | OK | Rp7.500.000,00 |
| | gg. Pelatih Senam/ Instruktur senam | OK | Rp200.000,00 |
| | hh. Pelatih Kesenian/ sejenis | OB | Rp400.000,00 |
| | ii. Pelatih Paskibraka | OH | Rp200.000,00 |
| | jj. Pelatih Olahraga / sejenis | OK | Rp250.000,00 |
| | kk. Pelatih Olahraga / sejenis | OH | Rp50.000,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|
| | ll. Petugas Uji Petik | Objek | Rp100.000,00 |
| | mm. Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) | OJ | Rp30.000,00 |
| | nn. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja | OJ | Rp10.000,00 |
| | oo. Freelance Radio Suara Banjar | OJ | Rp15.000,00 |
| | pp. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama | OJ | Rp60.000,00 |
| | qq. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya | OJ | Rp50.000,00 |
| | rr. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda | OJ | Rp40.000,00 |
| | ss. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama | OJ | Rp35.000,00 |
| | tt. Pembantu Penelitian/Perekayasaan | OJ | Rp25.000,00 |
| | uu. Koordinator Penelitian/Perekayasaan | OB | Rp420.000,00 |
| | vv. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan | OB | Rp420.000,00 |
| | ww. Pengolah Data | Penelitian/ Pereka yasaan | Rp1.540.000,00 |
| | xx. Petugas entry Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (SKP ASN) | OK | Rp300.000,00 |
| | yy. Petugas Verifikasi Berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) | OK | Rp300.000,00 |
| | zz. Petugas Verifikasi Penetapan Surat Keputusan Pensiun Satu Atap dari BKN Regional | OH | Rp350.000,00 |
| | aaa. Petugas Verifikasi Penetapan SK Pensiun Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel | OH | Rp350.000,00 |
| | bbb. Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKN Regional | OH | Rp350.000,00 |
| | ccc. Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel | OH | Rp350.000,00 |
| | ddd. Petugas Fasilitasi/ Evaluasi/ Harmonisasi Ranperda/ Ranperbup dari Kanwil Hukum dan HAM atau Provinsi Kalsel | O/Ran | Rp400.000,00 |
| | eee. Petugas Duta pariwisata | OH | Rp200.000,00 |
| | fff. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya) | Otm | Rp200.000,00 |

| | | | | |
|-----|--|--|----------|----------------|
| | | ggg. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga | Gtm | Rp1.500.000,00 |
| | | hhh. Petugas Hiburan Kesenian | OK | Rp200.000,00 |
| | | iii. Petugas Dekorasi | OK | Rp100.000,00 |
| | | jjj. Petugas Desain | OK | Rp100.000,00 |
| | | kkk. Petugas Lapangan | OH | Rp100.000,00 |
| | | lll. Petugas Kesenian/Sejenisnya | OH | Rp100.000,00 |
| | | mmm. Jasa Tata rias wajah | Orang | Rp300.000,00 |
| | | nnn. Jasa Tata rias wajah dan jilbab | Orang | Rp450.000,00 |
| | | ooo. Jasa Tari Penyambutan | | |
| | | 1) Kecil | Paket | Rp1.500.000,00 |
| | | 2) Sedang | Paket | Rp2.500.000,00 |
| | | 3) Besar | Paket | Rp4.000.000,00 |
| | | ppp. Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan | | |
| | | 1) Kecil | Paket | Rp1.000.000,00 |
| | | 2)Sedang | Paket | Rp2.000.000,00 |
| | | 3) Besar | Paket | Rp3.000.000,00 |
| | | qqq. Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya) | Perorang | Rp250.000,00 |
| | | rrr. Jasa Pelatih koor/paduan suara | OH | Rp100.000,00 |
| | | sss. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya) | Otm | Rp200.000,00 |
| | | ttt. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga | Gtm | Rp1.500.000,00 |
| | | uuu. Petugas Lapangan | OH | Rp100.000,00 |
| | | vvv. Petugas Logistik Pilkada/ Pilpres/Pileg | OH | Rp200.000,00 |
| | | www. Petugas Satlinmas Desa/ Kelurahan | | |
| | | 1)Apel Besar Nasional/Acara Tertentu | OK | Rp100.000,00 |
| | | 2)PAM PEMILU | OK | Rp150.000,00 |
| | | xxx. Petugas Survey/Pelacak Batas Wilayah | OH | Rp200.000,00 |
| 1.2 | | HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN | | |
| | | a. Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil | OB | Rp1.300.000,00 |

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| | b. Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD | OB | Rp2.250.000,00 |
| | c. Keamanan/pejaga malam/wakar | OB | Rp1.100.000,00 |
| | d. Pengemudi/Sopir | OB | Rp1.750.000,00 |
| | e. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda | OB | Rp1.200.000,00 |
| | f. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati | OB | Rp1.400.000,00 |
| | g. Insentif Dokter Internship | OB | Rp1.000.000,00 |
| | h. Pramubakti | OB | Rp1.000.000,00 |
| | i. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/Da'i/ Peceramah | OB | Rp3.000.000,00 |
| | j. Petugas Ketenagalistrikan | OB | Rp1.500.000,00 |
| | k. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Drainase/Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS > 5 Tahun | OB | Rp1.500.000,00 |
| | l. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Drainase/Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS < 5 tahun | OB | Rp1.300.000,00 |
| | m. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat) | OB | Rp2.000.000,00 |
| | n. Foreman/Pengawas alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana | OB | Rp2.750.000,00 |
| | o. Operator alat berat pengelolaan sampah/TPA Cahaya Kencana | OB | Rp2.500.000,00 |
| | p. Pembantu operator alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana | OB | Rp1.500.000,00 |
| | q. Pengawas gas metan | OB | Rp1.350.000,00 |
| | r. Supir Truk Sampah | OB | Rp1.750.000,00 |
| | s. Sopir roda tiga | OB | Rp1.500.000,00 |
| | t. Petugas Penarik Retribusi | OB | Rp1.000.000,00 |
| | u. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH) | OB | Rp1.000.000,00 |
| | v. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU) | OB | Rp1.750.000,00 |
| | w. Operator Peralatan (RPU) | OB | Rp1.000.000,00 |
| | x. Petugas Operasional (RPU) | OB | Rp2.000.000,00 |
| | y. Petugas Keurmaster | OB | Rp1.300.000,00 |
| | z. Petugas tenaga ahli batu | OB | Rp1.400.000,00 |
| | aa. Tenaga Ahli Desain | OB | Rp1.800.000,00 |
| | bb. Pengrajin Penggosok Batu Permata | OB | Rp1.500.000,00 |

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| | cc. Pengrajin Kamasan | OB | Rp1.500.000,00 |
| | dd. Pengrajin Casting | OB | Rp1.500.000,00 |
| | ee. Petugas Musholla | OB | Rp500.000,00 |
| | ff. Petugas Pelatih Kesenian/ sejenis | OB | Rp400.000,00 |
| | gg. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun | OB | Rp2.700.000,00 |
| | hh. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banjar masa kerja 15 tahun | OB | Rp4.000.000,00 |
| | ii. Tenaga Khusus Pembenihan Ikan | OB | Rp1.500.000,00 |
| | jj. Tenaga Kesehatan Pada UPT Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis (Dokter) PSC 119 Intan. | OB | Rp2.500.000,00 |
| | kk. Tenaga Programer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | | |
| | 1) < 5 Tahun | OB | Rp5.500.000,00 |
| | 2) > 5 Tahun atau berpendidikan S2 ..Programmer | OB | Rp6.500.000,00 |
| | ll. Petugas Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server (S1) | OB | Rp5.000.000,00 |
| | mm. Petugas Pelaksana Teknisi Jaringan (SMK) | OB | Rp2.000.000,00 |
| | nn. Petugas Pelaksana Teknis Jaringan (S1) | OB | Rp3.000.000,00 |
| | oo. Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (S1) | OB | Rp3.000.000,00 |
| | pp. Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (SLTA/SMK) | OB | Rp2.000.000,00 |
| | qq. Petugas Kameramen/Photografer | OB | Rp2.500.000,00 |
| | rr. Petugas Reporter/Penyiar | OB | Rp2.500.000,00 |
| | ss. Petugas Desain Grafis/Desain Visual (Multimedia) | OB | Rp2.500.000,00 |
| | tt. Petugas Pembuat Berita/Artikel | OB | Rp2.500.000,00 |
| | uu. Petugas Chief Engineer | OB | Rp2.500.000,00 |
| | vv. Petugas Operator Website | OB | Rp2.250.000,00 |
| | ww. Petugas Operator Sekeretariat PPID Utama Pemkab Banjar | OB | Rp2.250.000,00 |
| | xx. Petugas Operator LAPOR SP4N | OB | Rp2.250.000,00 |
| | yy. Petugas Perawat Ternak | OB | Rp1.750.000,00 |

| | | | | |
|--|------|---|----|----------------|
| | | zz. Petugas Perawat Hijauan Pakan Ternak | OB | Rp1.500.000,00 |
| | | aaa. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | OB | Rp2.100.000,00 |
| | | bbb. Operator Command Center | OB | Rp2.000.000,00 |
| | | ccc. Petugas pada Perwakilan Penghubung di Jakarta | OB | Rp2.400.000,00 |
| | | ddd. Petugas Kebersihan Warisan Budaya | OB | Rp500.000,00 |
| | | eee. Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya | OB | Rp750.000,00 |
| | | fff. Tenaga Ahli Cagar Budaya | OB | Rp1.600.000,00 |
| | | ggg. Petugas pendata pengunjung tempat wisata | OB | Rp300.000,00 |
| | | hhh. Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) | OB | Rp500.000,00 |
| | | iii. Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | OB | Rp500.000,00 |
| | | jjj. Petugas Jaga Pos Kontrol | OB | Rp2.000.000,00 |
| | | kkk. Pengawas Lapangan | OB | Rp350.000,00 |
| | | lll. Operator Call Center 112 | OB | Rp2.000.000,00 |
| | | mmm. Pengamat Pengairan | OB | Rp250.000,00 |
| | | nnn. Juru Pengairan | OB | Rp200.000,00 |
| | | ooo. Penjaga Bendungan dan Pintu Air | OH | Rp50.000,00 |
| | | ppp..Honor Guru SD dan SMP Daerah Terpencil | OB | Rp200.000,00 |
| | 1.3. | HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN | | |
| | | a. S2 | OB | Rp2.200.000,00 |
| | | b. S1/D4 > 10 Tahun | OB | Rp2.100.000,00 |
| | | c. S1/D4 5 sd 10 Tahun | OB | Rp2.000.000,00 |
| | | d. S1/D4 < 5 Tahun | OB | Rp1.800.000,00 |
| | | e. Diploma I/II/III > 5 Tahun | OB | Rp1.650.000,00 |
| | | f. Diploma I/II/III ≤ 5 Tahun | OB | Rp1.450.000,00 |
| | | g. SLTA /setara > 5 Tahun | OB | Rp1.300.000,00 |
| | | h. SLTA /setara ≤ 5 Tahun | OB | Rp1.200.000,00 |
| | | i. SLTP/setara > 5 Tahun | OB | Rp1.200.000,00 |
| | | j. SLTP/setara ≤ 5 Tahun | OB | Rp1.000.000,00 |
| | | k. SD/ setara > 5 Tahun | OB | Rp1.100.000,00 |
| | | l. SD/ setara ≤ 5 Tahun | OB | Rp900.000,00 |

| | | | |
|------|--|-----|----------------|
| 1.4. | HONOR PETUGAS PELAKSANA | | |
| | a. Petugas Penerimaan dan Ujian CPNS | OH | Rp60.000,00 |
| | b. Petugas Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah | OB | Rp300.000,00 |
| | c. Petugas Pengawas kebersihan | OB | Rp300.000,00 |
| | d. Petugas Pelaksana Perwakilan Penghubung | | |
| | 1)Koordinator | OB | Rp3.000.000,00 |
| | 2)Staf | OB | Rp1.000.000,00 |
| | e. Petugas Tenaga Ahli Sertifikasi Batu Mulia | OB | Rp5.000.000,00 |
| | f. Petugas Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang | | |
| | 1)Pejabat Otoritas Veteriner | OB | Rp1.500.000,00 |
| | 2)Dokter Hewan | OB | Rp1.000.000,00 |
| | g. Petugas Koordinator Pelayanan Kesehatan | OB | Rp2.500.000,00 |
| | h. Petugas Sensus Barang | OH | Rp50.000,00 |
| | i. Pembantu Pengurus Barang Pengelola | OB | Rp1.750.000,00 |
| | j. Petugas Penjaga Perpustakaan diluar Jam Kerja | OH | Rp100.000,00 |
| | k. Honorarium Survey Pemetaan/Pengembalian Batas/Sertifikasi tanah. | OH | Rp250.000,00 |
| | l. Administrator SIMDA/ SIPD/ BMD/ SIMGAJI PNS | OB | Rp1.250.000,00 |
| | m. Petugas Verifikator Sertifikat Elektronik | OB | Rp1.000.000,00 |
| | n. Petugas Survey/Pelacak Batas Wilayah | OH | Rp200.000,00 |
| | o. Honorarium Kunjungan Dokter spesialis Dari Rumah Sakit Ke UPT Puskesmas | Okj | Rp1.000.000,00 |
| | p. Petugas Verifikasi Internal Peralatan Standar Kemetrolgian | OK | Rp400.000,00 |
| | q. Honorarium Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat | OB | Rp1.500.000,00 |
| | r. Honorarium Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat | OB | Rp1.250.000,00 |
| | s. Honorarium Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan | OB | Rp1.250.000,00 |
| | t. Honorarium Kepala Sekolah (TK/PAUD,SD,SMP) | OB | Rp1.000.000,00 |

| | | | |
|------|---|-------|----------------|
| 1.5 | UPAH PETUGAS PARAMEDIS/ NON MEDIS PSC 119 INTAN BANJAR | | |
| | a.Paramedis | | |
| | 1)Pagi (08.00 – 14.15 Wita) | OW | Rp75.000,00 |
| | 2)Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita) | OW | Rp75.000,00 |
| | 3)Jaga Malam (20.15 – 08.15 Wita) | OW | Rp75.000,00 |
| | b.Non Medis | | |
| | 1)Pagi (08.00 – 14.15 Wita) | OW | Rp75.000,00 |
| | 2)Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita) | OW | Rp75.000,00 |
| | 3)Jaga Malam (20.15 – 08.15 Wita) | OW | Rp75.000,00 |
| 1.6. | HONOR PETUGAS KEGIATAN YUSTISI/ NON YUSTISI/ PENYIDIKAN/ TIPIRING/ OPERASIONAL PENGENDALIAN | | |
| | a. Yustisi/ Non Yustisi | | |
| | 1)Hakim | | |
| | a)Ketua | OK | Rp700.000,00 |
| | b)Anggota | OK | Rp500.000,00 |
| | 2)Panitera Pengganti | OK | Rp350.000,00 |
| | 3)Staf Pengadilan/Pidana Umum | OK | Rp250.000,00 |
| | 4)Jaksa | OK | Rp500.000,00 |
| | 5)Staf Pidum | OK | Rp350.000,00 |
| | 6)Korwas | OK | Rp350.000,00 |
| | 7)Kepala Sat.Pol PP/ Perwira Satpol PP/TNI/POLRI | OK | Rp250.000,00 |
| | 8)Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/ Perangkat Daerah | OK | Rp150.000,00 |
| | b.Kegiatan Penyidikan/ Operasi Tipiring | | |
| | 1) Pelaksana Kegiatan Penyidikan kasus garda | OK | Rp100.000,00 |
| | 2) Administrasi penyidikan kasus garda | OK | Rp250.000,00 |
| | 3) Majelis Hakim | Paket | Rp2.000.000,00 |
| | 4) Hakim | OK | Rp650.000,00 |
| | 5) KORWAS | OK | Rp350.000,00 |
| | 6) Panitera Pengganti | OK | Rp350.000,00 |
| | 7) Jaksa | OK | Rp500.000,00 |
| | 8) Saksi | OK | Rp250.000,00 |
| | 9) Ahli | OK | Rp750.000,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|--|----------|-----------------|
| | | c.Honor pelaksana kegiatan pengendalian dan operasional | | |
| | | 1) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kabupaten | OK | Rp80.000,00 |
| | | 2) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kecamatan | OK | Rp60.000,00 |
| | | 3) Operasional Kegiatan piket dirumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya | OH | Rp80.000,00 |
| | | 4) Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | OK | Rp100.000,00 |
| | | 5) Operasional Kegiatan Emergency petugas Rescue/Unit Reaksi Cepat (URC) dan kebencanaan | OK | Rp75.000,00 |
| | | 6) Operasional Kegiatan Emergency petugas Pemadam Kebakaran | OK | Rp50.000,00 |
| | | 7) Operasional Kegiatan Piket Siaga Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya | OH | Rp80.000,00 |
| | | 8) Petugas Penyelamatan di air (water rescue) | OH | Rp200.000,00 |
| | 1.7 | Honor Tenaga Ahli/ Pakar | | |
| | | 1.7.1. Guru Besar/ Profesor | OB | Rp3.500.000,00 |
| | | 1.7.2. Strata 3 | OB | Rp3.000.000,00 |
| | | 1.7.3. Strata 2 | OB | Rp2.500.000,00 |
| | | 1.7.4. Strata 1 | OB | Rp2.000.000,00 |
| | 1.8 | Tali Asih | | |
| | | 1.8.1. Tali Asih Super visor dan Fasilitator | OB | Rp150.000,00 |
| | | 1.8.2. Tali Asih Pendamping PKH | OB | Rp400.000,00 |
| | | 1.8.3..Tali Asih Lanjut Usia dan Anak Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial | OK | Rp150.000,00 |
| 2 | SATUAN MAKAN MINUM | | | |
| | 2.1. | Makan Minum Rapat | | |
| | | a. Makan (prasmanan) | Org/Kali | Rp40.000,00 |
| | | b. Makan (nasi kotak) | Org/Kali | Rp35.000,00 |
| | | c. Snack | Org/Kali | Rp15.000,00 |
| | 2.2. | Makan Minum Rumah Tangga | | |
| | | a Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati | Bulan | Rp19.450.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|---|----------|-----------------|
| | | b Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati | Bulan | Rp13.450.000,00 |
| 3 | SATUAN BIAYA SEWA | | | |
| | 3.1 | Belanja sewa generator | | |
| | | a. Sewa genset | Paket | Rp7.500.000,00 |
| | | b. Sewa Genset 20 KVA | Unit | Rp6.000.000,00 |
| | | c. Sewa Genset 40 KVA | Unit | Rp9.500.000,00 |
| | | d. Sewa Genset 60 KVA | Unit | Rp12.000.000,00 |
| | | e. Sewa Genset | Hari | Rp200.000,00 |
| | 3.2 | Belanja sewa tenda | | |
| | | a. Sewa tenda | Buah | Rp400.000,00 |
| | | b. Sewa tenda Non AC | Permeter | Rp50.000,00 |
| | | c. Sewa Tenda Ber AC | m2 | Rp2.000.000,00 |
| | | d. Sewa Tenda Berpanggung | m2 | Rp35.000,00 |
| | | e. Tenda Roders | m2 | Rp145.000,00 |
| | | f. Tenda Semi Roders | m2 | Rp75.000,00 |
| | | g. Tenda Sarnafil 5 x 5 m | Unit | Rp1.710.000,00 |
| | | h. Floring | m2 | Rp570.000,00 |
| | 3.3 | Sewa peralatan studio dan komunikasi | | |
| | | a. Sewa sound system Outdoor | Paket | Rp10.000.000,00 |
| | | b. Sewa sound system Indoor | Paket | Rp3.000.000,00 |
| | | c. Sewa pakaian adat/tradisional | Paket | Rp5.000.000,00 |
| | | d. Sewa Sound System 20.000 Watt | Set | Rp34.200.000,00 |
| | | e. Lighting Premium | Set | Rp28.500.000,00 |
| | 3.4 | Sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan | | |
| | | a. Sewa panggung besi | Paket | Rp10.000.000,00 |
| | | b. Sewa taman hidup | Paket | Rp2.500.000,00 |
| | | c. Sewa Bunga hidup (podium/meja) | Buah | Rp500.000,00 |
| | | d. Sewa air gucci/hiasan | Paket | Rp5.000.000,00 |
| | | e. Sewa AC | Buah | Rp1.500.000,00 |
| | | f. Sewa kipas angin salju | Buah | Rp750.000,00 |
| | | g. Panggung Rigging 12 x 10 | Set | Rp45.600.000,00 |
| | | h. Pagar Pembatas venue dan Zona/Barikade | meter | Rp70.000,00 |
| | | i. LED P6/Video Tron | m2 | Rp2.280.000,00 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------|----------------|
| | | j. LED P4/Video Tron | m2 | Rp2.565.000,00 |
| | | k. Sewa Laptop | Hari | Rp50.000,00 |
| | | l. Sewa Pesonal Computer (PC) | Hari | Rp25.000,00 |
| | | m. Sewa Meja Kursi | Hari | Rp25.000,00 |
| | | n. Sewa Kursi Plastik | Buah/Hari | Rp3.000,00 |
| | | o. Sewa Kursi Stainles | Buah/Hari | Rp5.000,00 |
| | | p. Sewa Baju (kostum/pakaian adat/pakaian tari) | Per kostum | Rp500.000,00 |
| 4 | SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/ INSENTIF/ UPAH | | | |
| | 4.1. | Uang Saku Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan | OB | Rp1.000.000,00 |
| | 4.2. | Uang Saku / Transportasi Pengiriman atraksi/ even Kesenian dan Kebudayaan | | |
| | | a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar | Orang/ Kali | Rp150.000,00 |
| | | b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi | Orang/ Kali | Rp250.000,00 |
| | 4.3. | Uang Saku pengiriman Atraksi/ Event Kepemudaan dan Keolahragaan : | | |
| | | a. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan | OH | Rp50.000,00 |
| | | b. Uang Saku Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar | OH | Rp100.000,00 |
| | | c. Uang Saku Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi | OH | Rp150.000 |
| | 4.4. | Uang Transportasi pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar | | |
| | | a. Transportasi Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar | Orang/Kali | Rp150.000,00 |
| | | b. Transportasi Pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| | 4.5. | Satuan Insentif Atlet Berprestasi | | |
| | | j. Peraih Medali Emas | | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------------|---------------|
| | | 1) Tunggal | Org/ Medali | Rp450.000,00 |
| | | 2) Ganda | Orang/ Medali | Rp400.000,00 |
| | | 3) Beregu < 6 | Orang/ Medali | Rp350.000,00 |
| | | 4) Beregu > 6 | Orang/ Medali | Rp300.000,00 |
| | | 5) Pelatih | Orang/ Medali | Rp.300.000,00 |
| | | b.Peraih Medali Perak | | |
| | | 1) Tunggal | Orang/ Medali | Rp400.000,00 |
| | | 2) Ganda | Orang/ Medali | Rp350.000,00 |
| | | 3) Beregu < 6 | Orang/ Medali | Rp300.000,00 |
| | | 4) Beregu > 6 | Orang/ Medali | Rp250.000,00 |
| | | 5) Pelatih | Orang/ Medali | Rp250.000,00 |
| | | c. Peraih Medali Perunggu | | |
| | | 1) Tunggal | Orang/ Medali | Rp350.000,00 |
| | | 2) Ganda | Orang/ Medali | Rp300.000,00 |
| | | 3) Beregu < 6 | Orang/ Medali | Rp250.000,00 |
| | | 4) Beregu > 6 | Orang/ Medali | Rp225.000,00 |
| | | 5) Pelatih | Orang/ Medali | Rp200.000,00 |
| 4.6 | | INSENTIF GURU PAUD, USTADZ/USTADZAH, GURU PONDOK PESANTREN, TUTOR PAKET, PENGELOLA PKBM, GURU INKLUSI DAN GURU HONOR | | |
| | | 1) Insentif Guru PAUD | OB | Rp250.000,00 |
| | | 2) Insentif Ustadz/Ustadzah TK. Al-Qur'an Al Banjari dan BKPMRI | OB | Rp100.000,00 |
| | | 3) Insentif Guru Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah | OB | Rp100.000,00 |
| | | 4) Insentif Tutor Paket A, Paket B dan Paket C | OB | Rp350.000,00 |

| | | | | |
|------|----|--|----|----------------|
| | | 5) Insentif Pengelola PKBM | OB | Rp350.000,00 |
| | | 6) Insentif Guru Inklusi SD dan SMP | OB | Rp100.000,00 |
| | | 7) Insentif Guru Honor SD dan SMP | OB | Rp150.000,00 |
| 4.7 | | UPAH PENDATAAN WARGA BELAJAR | | |
| | | 1) Upah pendataan warga belajar | OK | Rp1.000.000,00 |
| 4.8 | | UPAH PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL/PEKERJA SOSIAL | | |
| | | 1) Upah Pendamping Rehabilitasi Sosial/Pekerja Sosial | OK | Rp250.000,00 |
| 4.9 | | TRANSPORTASI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR DALAM DAN LUAR DAERAH | | |
| | | 1) Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Daerah | OK | Rp200.000,00 |
| | | 2) Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Luar Daerah | OK | Rp1.000.000,00 |
| 4.10 | | Insentif Tim Puskesmas | | |
| | | a. Fasilitator | OB | Rp300.000,00 |
| | | b. Ketua | OB | Rp200.000,00 |
| | | c. Sekretaris | OB | Rp150.000,00 |
| | | d. Bendahara | OB | Rp150.000,00 |
| | | e. Tenaga Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan | OB | Rp100.000,00 |
| 4.11 | | Insentif Ketua LPM, Insentif ketua RT/RW, Insentif Kader Posyandu | | |
| | | a. Insentif Ketua LPM | OB | Rp300.000,00 |
| | | b. Insentif Ketua RT/RW | OB | Rp300.000,00 |
| | | c. Insentif Kader Posyandu | OB | Rp50.000,00 |
| | | d. Insentif Jaga Linmas | OB | Rp100.000,00 |
| 5 | | UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN) | | |
| | a. | Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya. | OH | Rp150.000,00 |
| | b. | Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya | OH | Rp100.000,00 |
| | c. | Uang saku penyandang disabilitas dan gepeng Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial/Diklat dalam dan Luar Daerah | OK | Rp250.000,00 |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------|----------------|
| 6 | HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM | | | |
| | 6.1 | Tingkat Pertama (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik) | Org/ Tk.Perkara | Rp1.800.000,00 |
| | 6.2 | Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik) | Org/ Tk.Perkara | Rp1.800.000,00 |
| | 6.3 | Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik) | Org/ Tk.Perkara | Rp1.800.000,00 |
| | 6.4 | Peninjauan kembali (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik) | Org/ Tk.Perkara | Rp1.800.000,00 |
| | 6.5 | Biaya Pendaftaran Perkara/Upaya Hukum | Per Kegiatan | Riil Cost |
| | 6.6 | Mengajukan /menjawab gugatan Hak Uji materi ke Mahkamah Agung/Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi. | OK | Rp3.500.000,00 |
| 7 | HONORARIUM PENGAWASAN | | | |
| | 7.1 | Koordinasi Pengawasan | OH | Rp300.000,00 |
| | 7.2 | Ketua Tim Pengawasan | OH | Rp275.000,00 |
| | 7.3 | Pengendalian Teknis Pengawasan | OH | Rp300.000,00 |
| | 7.4 | Anggota Tim dari JFT/es. IV Pengawasan | OH | Rp250.000,00 |
| | 7.5 | Pengendalian Mutu Pengawasan | OH | Rp350.000,00 |
| 8 | HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL) | | | |
| | 8.1 | Petugas Pengawal Pribadi (Walpri) | OB | Rp2.500.000,00 |
| | 8.2 | Petugas Patroli dan Pengawasan lalu lintas dalam Kabupaten | OH | Rp200.000,00 |
| | 8.3 | Petugas Patroli dan Pengawasan lalu lintas luar Kabupaten | OH | Rp300.000,00 |
| 9 | Upah Petugas Entry Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK) | | Akta | Rp1.000,00 |
| 10 | Upah Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) | | | |
| | 10.1 | Petugas Pendata Desa/Kelurahan | Lembar | Rp5.000,00 |
| | 10.2 | Koordinator Lapangan | Lembar | Rp2.500,00 |
| | 10.3 | Petugas Kecamatan | Lembar | Rp2.500,00 |
| | 10.4 | Petugas Verifikasi | Lembar | Rp2.500,00 |
| 11 | Upah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (SPPT PBB P2) | | | |
| | 11.1 | Petugas Desa/Kelurahan | Lembar | Rp1.000,00 |
| | 11.2 | Petugas Kecamatan | Lembar | Rp500,00 |
| | 11.3 | Petugas Bapenda | Lembar | Rp500,00 |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|--------|--------------|
| 12 | SATUAN BIAYA FOTOKOPI | | | |
| | 12. 1 | Fotokopi HVS Hitam Putih | Lembar | Rp300,00 |
| | 12. 2 | Fotokopi HVS Warna | Lembar | Rp3.000,00 |
| | 12. 3 | Fotokopi Art Paper | Lembar | Rp4.000,00 |
| 13 | HONORARIUM MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | | Kasus | Rp350.000,00 |
| 14 | SATUAN BIAYA LAINNYA | | | |

Keterangan :

- a. OK = Orang Kegiatan
- b. OJ = Orang Jam
- c. OH = Orang Hari
- d. OS = Orang Semester
- e. OB = Orang Bulan
- f. Okj = Orang Kunjungan
- g. OR = Orang Responden
- h. Otm = Orang Tampil
- i. Gtm = Group Tampil
- j. OW = Orang waktu
- k. O/Ran = Orang/ Rancangan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR